

AKUNTANSI FORENSIK: TELAAH EMPIRIS PENERAPAN DALAM KURIKULUM AKUNTANSI

Zaenal Fanani

fanani@feb.unair.ac.id

Clarina Widyati Gunawan

Departemen Akuntansi-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga

ABSTRACT

The main objective of this study was to determine whether there are differences in the application of the teaching of forensic accounting in the accounting curriculum. This study uses a simple random sampling by distributing questionnaires for accounting lecturer in public and private universities with accreditation A. Observation data obtained as many as 63. The variables used were the relevance of teaching, teaching benefits, obstacles teaching, teaching materials, and learning mechanisms. Analysis techniques using Independent Sample T Test. The results showed that there is a difference between public and private universities in terms of teaching the relevance, benefits of teaching, teaching materials and learning mechanisms forensic accounting and there is no difference between public and private universities for teaching barriers forensic accounting. The results of the study indicate a greater interest in PTN to provide forensic accounting teaching, benefits of teaching, teaching materials and learning mechanisms. The obstacles in integrating forensic accounting in the accounting curriculum between PTN and PTS are no different. These obstacles include the lack of learning materials such as textbooks, lack of student interest, and lack of faculty interest in forensic accounting.

Key words: forensic accounting; accounting curriculum.

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penerapan pengajaran akuntansi forensik di kurikulum akuntansi. Penelitian ini menggunakan *simple random sampling* dengan menyebarkan kuesioner untuk dosen akuntansi di perguruan tinggi negeri dan swasta dengan akreditasi A. Data pengamatan yang diperoleh sebanyak 63. Variabel yang digunakan adalah relevansi pengajaran, manfaat pengajaran, hambatan pengajaran, materi ajar, dan mekanisme pembelajaran. Teknik analisis menggunakan uji beda *Independent Sample T Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam hal relevansi pengajaran, manfaat pengajaran, materi ajar dan mekanisme pembelajaran akuntansi forensik dan tidak terdapat perbedaan antara perguruan tinggi negeri dan swasta untuk hambatan pengajaran akuntansi forensik. Hasil penelitian mengindikasikan ketertarikan yang lebih besar pada PTN untuk memberi pengajaran akuntansi forensik, manfaat pengajaran, materi ajar dan mekanisme pembelajaran. Hambatan dalam mengintegrasikan akuntansi forensik dalam kurikulum akuntansi antara PTN dan PTS tidak berbeda. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya kurangnya materi pembelajaran seperti *textbook*, kurangnya minat mahasiswa, dan kurangnya ketertarikan fakultas pada akuntansi forensik

Kata-kata kunci: akuntansi forensik; kurikulum akuntansi.

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis dan teknologi yang terjadi saat ini telah mendukung berkembangnya berbagai macam tindak

kejahatan keuangan seperti terjadinya *fraud* pada perusahaan maupun instansi pemerintah yang semakin canggih sehingga sulit untuk dideteksi. Kecurangan yang terjadi di

Indonesia maupun di dunia telah mengakibatkan kerugian dengan nilai yang besar dan mengurangi kepercayaan investor pada perusahaan. *Association of Fraud Examiners (ACFE)* memprediksi jika kerugian akibat *fraud* pada tahun 2010 mencapai 5% dari Produk Domestik Bruto dunia. Kerugian akibat *fraud* yang terjadi di Indonesia belum dapat diperkirakan secara pasti nilainya. Namun, berbagai indikator seperti laporan tahunan yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional selalu menempatkan Indonesia pada jajaran negara-negara terkorup di dunia. Hal ini dapat menggambarkan korupsi (salah satu bentuk *fraud*) yang terjadi di Indonesia berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan (Suhernita *et al.*, 2012).

Kecurangan laporan keuangan yang terjadi di Indonesia di antaranya, kasus PT. Ades Alfiando yang melaporkan neraca keuangan lebih tinggi dari seharusnya pada tahun 2001 dan 2004. PT. Indofarma Tbk. yang melaporkan laporan keuangan 2001 lebih tinggi dari nilai seharusnya. Kasus Bank Century yang merugikan negara hingga 6,7 Triliun. Kasus Bank Lippo yang menerbitkan laporan keuangan ganda sehingga terdapat informasi yang berbeda antara September 2002 dengan Desember 2002. Kasus Bank Duta yang melakukan rekayasa transaksi keuangan perdagangan valas dan manipulasi laporan keuangan, dan masih banyak kasus kecurangan lainnya (Sayyid, 2013).

Dalam menyelesaikan berbagai masalah tindak kejahatan keuangan (*fraud*) berbagai pihak masih memandang *fraud* dari sisi ekonomi, pemerintahan, dan hukum saja. Penyelesaian masalah melalui sisi akuntansi masih jarang ditemui. Hal ini kurang sesuai diterapkan karena praktek kejahatan keuangan yang sering dijumpai terjadi pada penyusunan laporan keuangan. Akuntansi di Indonesia hanya digunakan untuk mendukung kelancaran bisnis seperti akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan audit namun, bidang-bidang akuntansi tersebut kurang

mampu untuk mendeteksi adanya *fraud* (Zamira dan Darsono, 2014).

Akuntansi forensik merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang dapat membantu menelaah *fraud* secara mendalam. Kecurangan keuangan yang terus terjadi, besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan tersebut, dan makin kompleksnya metode dalam melakukan kecurangan menjadikan akuntansi forensik sebagai topik yang sering diperbincangkan oleh profesi akuntan, penegak hukum, pembuat kebijakan dan akademisi.

Menurut Tuanakotta (2010:4), akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Akuntansi forensik sebenarnya bukanlah ilmu baru, Amerika Serikat sudah mengenal akuntansi forensik sejak tahun 1931 sedangkan di Indonesia akuntansi forensik mulai dikenal sejak krisis keuangan 1997.

Akuntansi forensik di Indonesia telah diterapkan oleh beberapa lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Laporan Keuangan (PPATK), dan Kantor Akuntan Publik (KAP) seperti Price Waterhouse Cooper (PwC) (Zamira dan Darsono, 2014).

Keberhasilan penerapan akuntansi forensik di Indonesia terlihat pada kesuksesan PwC dalam membongkar kasus Bank Bali. Dengan software khususnya, PwC mampu menunjukkan aliran dana yang rumit berbentuk seperti diagram cahaya matahari (*sunbrust*) kemudian PwC meringkasnya menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Metode yang digunakan untuk mengungkap kasus ini adalah mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali (*follow the money*) dan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) yang kemudian mengarahkan pada para pelaku (Tuanakotta, 2010:15).

Akuntansi forensik yang telah digunakan oleh berbagai lembaga yang ada di Indonesia dan keberhasilan PwC dalam membongkar kasus Bank Bali dapat menjadi peluang bagi lulusan-lulusan akuntansi untuk berkarir pada bidang akuntansi forensik. Penelitian Rezaee *et al.* (2004) menunjukkan bahwa bidang akuntansi forensik menjadi peluang karir yang menjanjikan bagi akuntan untuk melawan *fraud*. Selain itu, *demand* pada akuntansi forensik diprediksi akan meningkat di masa depan (Hidayat dan Al-Hadrami, 2015). Peningkatan *demand* pada akuntansi forensik tersebut dapat menjadi peluang besar bagi lulusan akuntansi. Selain itu, dengan semakin banyak orang yang berkarir di bidang akuntansi forensik dapat membantu untuk menyelesaikan berbagai kasus *fraud* yang terjadi.

Adanya kesempatan untuk berkarir pada bidang akuntansi tersebut tidak didukung oleh pemberian materi mengenai akuntansi forensik pada tingkat perguruan tinggi. Saat ini hanya beberapa program studi akuntansi yang memberikan materi akuntansi forensik. Hal ini mengakibatkan munculnya kesenjangan antara pendidikan dan praktek akuntansi forensik (Rezaee *et al.*, 2004). Ketersediaan data dan informasi mengenai akuntansi forensik yang minim di Indonesia mengakibatkan perkembangan akuntansi forensik menjadi lambat, bahkan istilah akuntansi forensik bagi sebagian mahasiswa akuntansi masih terdengar asing.

Peluang karir pada bidang akuntansi forensik dan besarnya peran akuntansi forensik untuk mengatasi *fraud* menjadikan akuntansi forensik sebagai salah satu mata kuliah yang dapat diberikan pada perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi di Indonesia sebagian besar belum memberikan materi akuntansi forensik akan tetapi hanya sebatas mata kuliah pengauditan. Pengauditan merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari pada akuntansi forensik sehingga diperlukan pembelajaran lebih jauh mengenai akuntansi forensik.

Perguruan tinggi di berbagai negara berencana untuk mengintegrasikan akuntansi forensik ke dalam kurikulum akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Al-Hadrami (2015) menunjukkan jika universitas-universitas di Bahrain akan mengintegrasikan materi akuntansi forensik, kecurangan, topik investigasi dan legislasi, regulasi dan topik pemerintahan penting ke dalam kurikulum akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Efiyong (2012) menunjukkan jika teknik akuntansi forensik seharusnya ditambahkan pada kurikulum akuntansi pada tingkatan *undergraduate* dan *post-graduated* di universitas-universitas Nigeria. Keinginan universitas-universitas di berbagai negara untuk mengintegrasikan akuntansi forensik ke dalam kurikulum tidak diikuti hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugianto dan Jiantari (2014). Penelitian ini menyatakan bahwa mata kuliah akuntansi forensik tidak harus menjadi mata kuliah tersendiri, tapi cukup diperkenalkan secara tersirat dalam mata kuliah di jurusan akuntansi di Indonesia. Hal ini karena terdapat kekhawatiran akan terjadi kebingungan bagi mahasiswa akuntansi S1 yang belum memahami matakuliah pengauditan, namun harus mempelajari akuntansi forensik. Penelitian di beberapa negara yang membahas tentang akuntansi forensik dalam dunia Pendidikan diantaranya Bhavani *et al.* (2018). Penelitian Bhavani *et al.* (2018) mengeksplorasi relevansi pendidikan akuntansi forensik dari perspektif yang lebih luas menggunakan UEA sebagai studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sedikit perhatian yang dikhususkan oleh universitas untuk penawaran kurikulum akuntansi forensik di kedua studi pascasarjana dan pascasarjana.

Studi Alshurafat *et al.* (2019) mengeksplorasi konstruksi kurikulum akuntansi forensik di universitas-universitas Australia dengan melakukan analisis tematik pada kurikulum seperti yang disajikan di situs web universitas, sementara Kramer *et al.* (2016) meneliti pandangan saat ini dari pendidik dan praktisi mengenai pendidikan

akuntansi forensik. Hasil penelitian membuktikan bahwa praktisi menghargai beberapa keterampilan akuntansi nontradisional, seperti dalam teknologi forensik dan wawancara, lebih tinggi daripada akademisi, yang menunjukkan pendidik akuntansi mungkin perlu mengembangkan pendekatan interdisipliner untuk pendidikan akuntansi forensik.

Adanya kesenjangan antara praktek dan pendidikan pada akuntansi forensik dan perbedaan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi forensik pada kurikulum akuntansi menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian kali ini mengangkat topik yang sama dengan penelitian Rezaee *et al.* (2004) mengenai penerapan akuntansi forensik dalam kurikulum akuntansi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada responden atau sampel yang digunakan. Penelitian Rezaee *et al.* (2004) menggunakan sampel akademisi dan praktisi sedangkan penelitian ini menggunakan sampel dosen akuntansi yang mengajar pada perguruan tinggi negeri dan swasta yang berada di Surabaya.

Dosen akuntansi perguruan tinggi negeri dan swasta dipilih sebagai responden karena dosen akuntansi dianggap memiliki pengetahuan mengenai perkembangan akuntansi yang terjadi, dan memahami kondisi yang ada di perguruan tinggi tempat mereka mengajar. Perguruan tinggi negeri dan swasta memiliki kondisi yang berbeda. Perbedaan tersebut diantaranya dapat terlihat pada *input* mahasiswa pada perguruan tinggi negeri dan swasta. Proses seleksi penerimaan mahasiswa yang lebih ketat pada perguruan tinggi negeri membuat perguruan tinggi negeri memiliki mahasiswa dengan kemampuan intelektual lebih baik dibanding dengan perguruan tinggi swasta.

Kemampuan mahasiswa menjadi salah satu pertimbangan dalam merancang suatu kurikulum pembelajaran. Adanya perbedaan kemampuan mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta memungkinkan

terjadinya perbedaan penerapan akuntansi forensik pada kurikulum akuntansi perguruan tinggi negeri dan swasta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu apakah terdapat perbedaan antara perguruan tinggi negeri dan swasta mengenai penerapan akuntansi forensik dalam kurikulum akuntansi terkait dengan relevansi pengajaran, manfaat pengajaran, hambatan pengajaran, materi ajar dan mekanisme pembelajaran?

TINJAUAN TEORETIS

Teori Stakeholder

Stakeholders merupakan individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Freeman dan Reed (1983) mendefinisikan *stakeholders* sebagai individu atau kelompok yang memberi dukungan pada keberadaan suatu organisasi, tanpa adanya dukungan dari *stakeholders* organisasi tersebut tidak akan ada. Setiap tindakan yang diambil manajemen pada akhirnya mengutamakan kepentingan korporasi dan pemangku kepentingan.

Menurut Wijatno (2009:320) teori *stakeholders* dapat diterapkan dalam konteks perguruan tinggi. Pertama, dengan melakukan identifikasi para pemangku kepentingan sesuai dengan peran setiap pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dalam perguruan tinggi terdiri atas: pemimpin perguruan tinggi, dosen dan karyawan, mahasiswa, orang tua atau wali mahasiswa, lulusan atau alumni, pemerintah atau yayasan pengelola perguruan tinggi, masyarakat luas, perusahaan atau instansi pengguna lulusan, dan pemerintah dalam hal ini Kopertis dan Dirjen Dikti.

Pemangku kepentingan dalam perguruan tinggi dapat dibagi menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut Wijatno (2009:320) kelompok primer adalah mereka yang berinteraksi langsung dengan perusahaan, sedangkan kelompok sekunder adalah semua pe-

mangku kepentingan yang tidak termasuk di dalam kelompok primer. Kelompok sekunder tidak berinteraksi secara langsung dengan perusahaan, tetapi kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) kelompok sekunder dapat memengaruhi keberadaan suatu perusahaan.

Wijatno (2009:320) mengklasifikasikan kelompok primer terdiri dari pimpinan perguruan tinggi, yayasan pengelola, maha-

siswa, dosen atau karyawan, dan lulusan atau alumni. Kelompok sekunder terdiri dari orangtua atau wali mahasiswa, masyarakat luas, perusahaan atau instansi pengguna lulusan, pemerintah (Kopertis dan Dirjen Dikti), dan media massa.

Wijatno (2009:321) menjelaskan kepentingan yang dimiliki oleh kelompok pemangku kepentingan dalam perguruan tinggi sebagai berikut:

Tabel 1
Kepentingan kelompok *stakeholders*

Pemangku Kepentingan	Kepentingan (<i>Interest</i>)
Kelompok Primer:	
1. Mahasiswa	Memperoleh pendidikan berkualitas dan memperoleh pelayanan yang memuaskan.
2. Alumni	Dapat menggunakan ilmu yang diperoleh untuk mendapatkan pekerjaan.
3. Yayasan Pengelola	Mengelola perguruan tinggi secara efektif dan efisien serta mampu menghasilkan lulusan yang dapat diserap pasar tenaga kerja.
Pemangku Kepentingan	Kepentingan (<i>Interest</i>)
4. Dosen atau Karyawan	Menjaga keberlangsungan perguruan tinggi dalam jangka panjang. Menjadi subjek hukum pengelolaan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai badan hukum dan bertindak untuk kepentingan perbankan dan perpajakan. Mampu mengembangkan ilmu serta profesionalitas sesuai dengan tuntutan zaman. Memperoleh gaji atau upah yang wajar dan ada kepastian kelangsungan pekerjaan.
Kelompok Sekunder:	
1. Pemerintah	Mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Memperoleh pajak.
2. Masyarakat	Mengharapkan peran serta perguruan tinggi dalam program kesejahteraan masyarakat dan menjaga kesehatan lingkungan.
3. Media massa	Menginformasikan semua kegiatan perguruan tinggi yang berkaitan dengan isu etika, nilai-nilai, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan.
Pemangku Kepentingan	Kepentingan (<i>Interest</i>)
4. Orang tua atau wali mahasiswa	Mempercayakan pendidikan anaknya agar memperoleh masa depan yang baik dan pendidikan yang berkualitas.

Sumber: Wijatno (2009)

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun perusahaan harus memberikan manfaat bagi *stakeholders* (Ghazali dan Chariri, 2007: 409). Oleh karena itu, perguruan tinggi harus saling berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga keberadaan perguruan tinggi dipengaruhi oleh dan atau memengaruhi semua pemangku kepentingan. Keberadaan perguruan tinggi yang sangat terkait dengan *stakeholders* membuat para pemimpin perguruan tinggi perlu menyadari pentingnya melakukan proses keputusan berdasarkan pendekatan dan analisis pemangku kepentingan.

Berdasarkan analisis kepentingan yang dimiliki para *stakeholders* di atas, pihak pengelola perguruan tinggi harus selalu memperhatikan para pemangku kepentingannya dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak merugikan dan bertentangan dengan pemangku kepentingan. Salah satu kebijakan yang terkait dengan *stakeholders* terutama kelompok primer adalah kebijakan mengenai kurikulum perguruan tinggi. Kelompok primer seperti alumni dan yayasan pengelola memiliki kepentingan (*interest*) untuk menghasilkan lulusan yang dapat diserap oleh pasar tenaga kerja. Oleh karena itu kurikulum yang diberikan seharusnya memiliki relevansi dengan dunia kerja. Adanya peluang kerja pada bidang akuntansi forensik dapat menjadi pertimbangan bagi perguruan tinggi untuk menambahkan matakuliah akuntansi forensik ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Penambahan matakuliah akuntansi forensik yang memiliki relevansi dengan dunia kerja dapat membantu lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pekerjaan di bidang akuntansi forensik. Sehingga, kepentingan *stakeholders* perguruan tinggi yang berkaitan dengan dunia kerja akan tercapai.

Perbedaan relevansi pengajaran antara PTN dan PTS

Penelitian Rezaee *et al.* (2004) menjelaskan bahwa akademisi dan praktisi

memandang permintaan dan ketertarikan pada jasa akuntansi forensik yang terdiri dari *litigation support*, *expert witnessing*, dan *fraud examination* akan meningkat. Adanya peningkatan permintaan pada jasa akuntansi forensik menunjukkan kesempatan kerja bagi lulusan akuntansi. Pendidikan akuntansi forensik dibutuhkan mahasiswa untuk memenuhi peluang tersebut. Berdasarkan teori *stakeholders* pada perguruan tinggi, alumni memiliki kepentingan untuk menggunakan ilmu yang diperoleh dalam mendapatkan pekerjaan dan perguruan tinggi memiliki kepentingan untuk menghasilkan lulusan yang dapat diserap pasar tenaga kerja. Berdasarkan teori tersebut, pengajaran akuntansi forensik memiliki relevansi untuk diberikan karena adanya kepentingan alumni dan perguruan tinggi untuk memenuhi peluang kerja.

Menurut Huber (2012) akuntansi forensik di Amerika Serikat memiliki relevansi dengan nilai-nilai sosial. Kondisi berbeda terjadi di Indonesia, akuntansi forensik di Indonesia belum banyak dimanfaatkan untuk mencari bukti atau kebenaran untuk menangani masalah kecurangan keuangan. Menurut Tuanakotta (2010: 17) akuntansi forensik di Indonesia lebih banyak digunakan pada sektor publik daripada sektor privat. Menurut Zamira dan Darsono (2014) akuntansi forensik di Indonesia belum dapat memaksimalkan nilai-nilai sosial sehingga dapat terjadi perbedaan persepsi antar kalangan mengenai relevansi akuntansi forensik.

Perbedaan sumber daya manusia di PTN dan PTS dapat menyebabkan adanya perbedaan relevansi pengajaran akuntansi forensik. Berdasarkan data Dikti, PTN memiliki dosen aktif dengan tingkat pendidikan lebih baik daripada PTS. Hal ini dapat dilihat pada jumlah dosen dengan tingkat pendidikan S3, PTN memiliki 18.376 orang sedangkan PTS hanya memiliki 8.690 orang. Dengan memiliki dosen yang memiliki pendidikan tinggi, PTN seharusnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengajarkan akuntansi forensik

dibanding PTS. Pengajaran suatu mata kuliah tidak hanya terkait dengan faktor sumber daya manusia. Faktor lain yang dapat mendukung pengintegrasian mata kuliah dalam kurikulum adalah sumber dana keuangan. Penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi terkait dengan pendanaan dan lain-lain telah diatur dalam UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Berdasarkan undang-undang tersebut, bantuan dana yang diberikan pada PTN dan PTS besarnya tidak sama. Sesuai amanat UU No.12 tahun 2012, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memberi biaya operasional untuk PTS serta membayar gaji dosen dan tenaga kependidikannya. Oleh karena itu besarnya dana untuk PTN dan PTS berbeda. Pasal 89 UU No.12 tahun 2012 menyatakan, dana pendidikan tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rapat yang digelar Komisi X DPR RI bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTNI) pada 12 Oktober 2015, DPR sepakat memperjuangkan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) 2016 sebesar Rp 5,5 triliun. Jumlah tersebut naik Rp 1 triliun dibanding BOPTN tahun 2015, juga lebih besar Rp 1,8 triliun dari rencana pemerintah sebesar Rp 3,7 triliun. (sumber: www.harnas.co). Sumber dana PTN yang besar tersebut memberi dukungan pada proses kegiatan belajar mengajar, sehingga PTN lebih mudah mengintegrasikan pendidikan akuntansi forensik dalam kurikulum.

Dengan memiliki dosen yang berpendidikan tinggi dan sumber dana keuangan yang besar, PTN lebih relevan dalam memberikan pengajaran akuntansi forensik dibanding PTS.

Berdasarkan uraian di atas diajukan hipotesis:

H₁: Relevansi pengajaran akuntansi forensik pada PTN lebih tinggi daripada PTS

Perbedaan manfaat pengajaran antara PTN dan PTS

Pada dasarnya akuntansi forensik digunakan untuk menangani *fraud*. Akuntansi forensik di Indonesia digunakan untuk menangani *fraud* dalam bentuk korupsi. Kasus korupsi di Indonesia yang terjadi di sektor publik telah merugikan negara dengan nilai yang besar. Kasus-kasus di sektor publik juga diikuti adanya kolusi antara penyelenggara negara di tingkat tinggi dengan para pebisnis. Peran akuntan forensik dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.

Berdasarkan teori *stakeholders* pada perguruan tinggi, masyarakat memiliki kepentingan dengan mengharapkan peran serta perguruan tinggi dalam menjaga kesehatan lingkungan masyarakat. Kesehatan lingkungan dapat dikaitkan dengan peran serta lulusan dalam memberantas korupsi sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Berdasarkan teori tersebut, pengajaran akuntansi forensik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. Salah satunya dengan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Menurut Tuanakotta (2010) peran-peran penting akuntan forensik di Indonesia terlihat pada BPKP, BPK, dan aparat pengawasan internal pemerintah. Menurut Carpenter *et al.* (2011) mahasiswa yang mengikuti pelatihan tentang akuntansi forensik memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menilai risiko adanya *fraud* dan memiliki sikap skeptisme dibanding dengan mahasiswa yang tidak mengikuti pelatihan akuntansi forensik. Menurut Rezaee *et al.* (2004) dengan adanya akuntansi forensik dalam kurikulum akuntansi dapat memberikan manfaat bagi institusi akademik, mahasiswa, dan para pengguna lulusan akuntansi.

Mahasiswa pada perguruan tinggi negeri (PTN) pada umumnya dinilai memiliki kemampuan akademis di atas mahasiswa perguruan tinggi swasta. Hal ini terkait dengan proses seleksi penerimaan

mahasiswa di PTN yang lebih ketat daripada PTS. Pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2015 terdapat 852.093 peserta dan 137.005 peserta dinyatakan lolos seleksi SNMPTN 2015. Berdasarkan data tersebut hanya 16,08% peserta yang berhasil lolos SNMPTN (sumber: news.liputan6.com). Seleksi penerimaan mahasiswa PTN yang ketat tersebut diharapkan memberi *input* mahasiswa yang berkualitas. Adanya perbedaan kemampuan akademis antara mahasiswa PTN dan PTS dapat berdampak pada perbedaan penerimaan manfaat dari pengajaran suatu matakuliah. Mahasiswa PTN yang memiliki kemampuan akademis lebih baik seharusnya memperoleh manfaat yang lebih besar daripada mahasiswa PTS. Berdasarkan uraian di atas diajukan hipotesis:

H₂ : Manfaat pengajaran akuntansi forensik pada PTN lebih tinggi dari PTS

Perbedaan hambatan pengajaran antara PTN dan PTS

Penelitian Rezaee *et al.* (2004) menjelaskan bahwa hambatan utama dalam mengajarkan akuntansi forensik adalah kurangnya sumber dana keuangan. Faktor-faktor lain yang menjadi penghambat diantaranya kurangnya materi pembelajaran, kurangnya minat dan dukungan administrasi, dan kurangnya ketertarikan fakultas pada akuntansi forensik. Menurut Rezaee *et al.* (2004) hambatan dalam mengintegrasikan pendidikan akuntansi forensik berasal dari institusi pendidikan (fakultas, keuangan, dan administrasi) dan tidak disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja pada bidang akuntansi forensik. Berdasarkan teori *stakeholders* pengelola perguruan tinggi memiliki kepentingan untuk mengelola perguruan tinggi secara efektif dan efisien serta mampu menghasilkan lulusan yang dapat diserap tenaga kerja. Hambatan dalam mengintegrasikan akuntansi forensik seharusnya dapat diantisipasi oleh pengelola perguruan tinggi sehingga tidak menghambat perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang

memiliki pendidikan akuntansi forensik yang dapat diserap tenaga kerja.

Penelitian Suhernita *et al.* (2012) menunjukkan bahwa hambatan utama pengintegrasian akuntansi forensik dalam kurikulum akuntansi adalah ketersediaan tenaga pengajar. Selain hambatan tersebut, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengajaran akuntansi forensik diantaranya ketidakfleksibelan dari kurikulum akuntansi yang ada, kurangnya sumber dana keuangan, kurangnya peluang kerja, tidak tersedianya standar dan *guidelines*, kurangnya minat fakultas atau jurusan akuntansi, kurangnya kemauan dan *support* administrasi, dan kurangnya minat mahasiswa. Menurut Suhernita *et al.* (2012) strategi awal untuk mengintegrasikan pendidikan akuntansi forensik adalah mempersiapkan tenaga pengajar yang menspesialisasikan diri dalam bidang akuntansi forensik.

Perguruan tinggi negeri dan swasta memiliki sumber pendanaan yang berbeda. Berdasarkan amanat UU No.12 Tahun 2012 pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memberi biaya operasional untuk PTS serta membayar gaji dosen dan tenaga kependidikannya. PP 26 Tahun 2015 pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa bantuan pendanaan PTN Badan Hukum dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi. Pada PP 26 Tahun 2015 pasal 4 ayat 2 lebih lanjut dijelaskan bahwa bantuan PTN pendanaan Badan Hukum yang dialokasikan dari APBN sebesar 20% dari alokasi anggaran fungsi pendidikan.

Selain pendanaan dari APBN, PTN Badan Hukum dapat memperoleh sumber pendanaan diluar APBN. Menurut PP 26 Tahun 2015 pasal 11 ayat 1 sumber pendanaan PTN Badan Hukum selain APBN diantaranya bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, kerja sama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan

kekayaan PTN Badan Hukum, anggaran dan pendapatan belanja daerah, dan pinjaman. Peraturan ini menunjukkan jika PTN memiliki seharusnya memiliki pendanaan yang lebih besar dibanding PTS.

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan jika PTN memiliki jumlah dosen dengan jumlah lebih banyak dibanding dengan PTS. Selain itu, PTN memiliki dosen dengan tingkat pendidikan S3 lebih banyak dibanding PTS. Berdasarkan uraian di atas diajukan hipotesis:

H₃ : Hambatan pengajaran akuntansi forensik di PTN lebih rendah dari PTS.

Perbedaan materi ajar antara PTN dan PTS

Akuntansi forensik bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, namun, akuntansi forensik terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Menurut Tuanakotta (2010) akuntansi forensik terdiri dari ilmu akuntansi, ilmu hukum, dan ilmu audit. Menurut Rezaee *et al.* (2004) akuntansi forensik sebaiknya memiliki elemen seperti pendeteksian dan pencegahan *fraud*, bantuan untuk menyelesaikan masalah keuangan di pengadilan (*litigation support*), dan kemampuan sebagai saksi ahli (*expert witnessing*).

Akuntansi forensik sebagai penerapan dari *skill* ilmu keuangan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Keahlian di bidang keuangan saja tidak cukup untuk menjadi akuntan forensik. Akuntan forensik memerlukan pengetahuan tentang *fraud*, realita bisnis dan proses dari sistem hukum. Berdasarkan kompleksitas akuntansi forensik karena merupakan multi disiplin ilmu, maka dalam materi akuntansi forensik perlu memuat topik-topik yang relevan. Teori *stakeholders* pada perguruan tinggi menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki kepentingan untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan memperoleh pelayanan yang memuaskan. Berdasarkan teori tersebut, perguruan tinggi seharusnya memberikan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Salah satunya dengan memberi materi ajar yang dapat

digunakan sebagai bekal untuk memenuhi tuntutan dunia kerja seperti akuntansi forensik.

Materi akuntansi forensik yang akan diberikan pada PTN dan PTS dapat memiliki konten yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pada kemampuan akademis mahasiswa. PTN yang memiliki mahasiswa dengan kemampuan akademis yang lebih baik dari PTS seharusnya dapat menerima materi yang lebih berbobot. Materi pembelajaran tidak hanya mengajarkan teori namun juga praktek dalam akuntansi forensik. Berdasarkan uraian di atas diajukan hipotesis:

H₄ : Materi ajar akuntansi forensik pada PTN lebih berbobot dari PTS

Perbedaan mekanisme pembelajaran antara PTN dan PTS

Seorang dosen memiliki tugas untuk mengajar mahasiswa. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dosen tidak dapat melakukannya secara sembarangan tetapi harus menggunakan teori-teori dan prinsip-prinsip belajar tertentu agar dapat bertindak secara tepat. Teori dan prinsip belajar dapat membimbing pendidik untuk dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Dimiyati dan Mudjiono, 2002:41).

Menurut Dimiyati dan Mudjiono (2002: 42) prinsip-prinsip belajar adalah perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, dan perbedaan individual. Peserta didik merupakan individu yang unik artinya tidak ada dua orang yang sama persis tetapi memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Perbedaan individu perlu mendapat perhatian dari pengajar dalam upaya pembelajaran (Dimiyati dan Mudjiono, 2002:49).

Pembelajaran yang bersifat klasikal yang mengabaikan perbedaan individual dapat diperbaiki dengan menggunakan metode belajar mengajar dan media

instruksional yang bervariasi sehingga dapat membantu mengatasi perbedaan-perbedaan kemampuan peserta didik. Pembelajaran klasikal juga dapat diperbaiki dengan memberikan tambahan pelajaran atau pengayaan bagi siswa yang pandai dan memberikan bimbingan bagi siswa yang kurang (Dimiyati dan Mudjiono, 2002:49).

Perbedaan kemampuan intelektual antara mahasiswa PTN dan PTS berdampak pada mekanisme pembelajaran yang digunakan oleh pengajar. Dosen PTN dapat menggunakan mekanisme pembelajaran yang lebih bervariasi dan lebih baik karena memiliki mahasiswa dengan kemampuan intelektual lebih tinggi dibanding mahasiswa PTS.

Teori *stakeholders* pada perguruan tinggi menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki kepentingan untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan memperoleh pelayanan yang memuaskan dan dosen memiliki kepentingan untuk mengembangkan ilmu sesuai dengan tuntutan zaman. Berdasarkan teori tersebut dosen sebaiknya merancang mekanisme pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa sehingga dapat memberikan pendidikan yang berkualitas bagi mahasiswa. Berdasarkan uraian di atas diajukan hipotesis:

H₅ : Mekanisme pembelajaran akuntansi forensik pada PTN lebih tinggi dari PTS

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif yang bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Kelompok yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah relevansi pengajaran, manfaat pengajaran, materi ajar dan mekanisme pembelajaran.

Berdasarkan model analisis penelitian yang disajikan sebelumnya, maka variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam variabel, yaitu:

1. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sekaran dan Bougie, 2016: 73). Variabel terikat pada penelitian ini adalah relevansi pengajaran, manfaat pengajaran, materi ajar, dan mekanisme pembelajaran.

2. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat (Sekaran dan Bougie, 2016: 74). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dosen perguruan tinggi negeri dan dosen perguruan tinggi swasta.

Definisi Operasional

Untuk menghindari ketidakjelasan makna dari variabel yang digunakan dalam penelitian, maka berikut ini akan diberikan definisi operasional dari variabel-variabel tersebut.

a. Relevansi Pengajaran

Pada konteks pendidikan mengatakan bahwa relevansi adalah tingkat keterkaitan tujuan dan hasil atau keluaran program studi dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global (Wijatno, 2009:62).

b. Manfaat Pengajaran

Manfaat pengajaran adalah manfaat atau kegunaan pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar mengajar (Syah, 2002:181)

c. Hambatan Pengajaran

Hambatan pengajaran adalah hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya pengajaran suatu matakuliah (Novia, 2006:188)

d. Materi Ajar

Materi ajar adalah seperangkat bahan pelajaran yang disusun secara sistematis, dan menampilkan kompetensi yang akan

dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran (Novia, 2006:188)

e. Mekanisme Pembelajaran

Mekanisme pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan oleh pengajar untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang mengajar pada program studi akuntansi dengan akreditasi A di Kota Surabaya berjumlah 219. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan pada 29 Februari sampai dengan 22 April 2016. Jumlah kuesioner yang dikirim sebanyak 141 kuesioner dan jumlah kuesioner kembali adalah 63 kuesioner. Rincian pengembalian kuesioner adalah sebagai berikut Universitas Airlangga 21 kuesioner, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim 10 kuesioner, Universitas Widya Mandala 9 kuesioner, Universitas Kristen Petra 1 kuesioner, Universitas Surabaya 1 kuesioner, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya 11 kuesioner, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 10 kuesioner. Berdasarkan rincian tersebut maka jumlah kuesioner yang berasal dari PTN sebanyak 31 kuesioner terdiri dari

kuesioner Universitas Airlangga dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim 10 kuesioner sedangkan kuesioner yang berasal dari PTS sebanyak 32 kuesioner yang terdiri dari Universitas Widya Mandala, Universitas Kristen Petra, Universitas Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis

Uji Validitas dan reliabilitas

Berdasarkan hasil uji, semua indikator valid dan reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data memiliki sebaran normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Data memiliki distribusi normal apabila nilai $Asym.Sig. > 0,05$ dan data berdistribusi tidak normal jika nilai $Asym.Sig. < 0,05$. Berikut hasil uji normalitas:

Berdasarkan hasil uji normalitas, data-data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai $Asym.Sig. > 0,05$ sehingga dapat dikatakan jika data berdistribusi normal. Apabila data memiliki distribusi normal untuk uji hipotesis akan digunakan uji *Independent sample T-test*.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

Item Pertanyaan	Asym.Sig.	Keterangan
Relevansi pengajaran	0,346	Normal
Manfaat pengajaran	0,591	Normal
Hambatan pengajaran	0,470	Normal
Materi ajar	0,288	Normal
Mekanisme pembelajaran	0,250	Normal

Sumber: data olahan

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan uji *Inde-*

pendent sample T-test dengan menggunakan program SPSS versi 20. Uji T dua sampel independen pada prinsipnya bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup

antara PTN dan PTS yang tidak saling berhubungan. Hal ini bertujuan untuk menguji apakah kedua grup memiliki rata-

rata yang sama atau tidak secara signifikan. Berikut hasil uji hipotesis:

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Mean	Mean	Levene's Test		Uji T	
	PTN	PTS	F	Sig.	t	Sig
Relevansi pengajaran	28,0000	25,0625	0,001	0,978	3,889	0,0000***
Manfaat pengajaran	31,1613	29,2500	1,882	0,175	2,010	0,049**
Hambatan pengajaran	18,35	18,88	2,909	0,093	-0,500	0,619
Materi ajar	202,19	189,91	2,388	0,127	1,856	0,068*
Mekanisme pembelajaran	27,26	24,31	1,118	0,295	3,448	0,001***

Sumber: data olahan

Keterangan: * signifikan pada level 0,1
** signifikan pada level 0,05
*** signifikan pada level 0,01

Perbedaan relevansi pengajaran antara PTN dan PTS

Berdasarkan hasil uji rata-rata relevansi pengajaran pada Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa rata-rata relevansi pengajaran pada PTN lebih tinggi dari PTS. Hal ini dapat diketahui dari nilai *mean* untuk kelompok PTN adalah 28,0000, sedangkan *mean* untuk kelompok PTS adalah 25,0625 (*mean* PTN > *mean* PTS). Untuk mengetahui taraf signifikansi perbedaan rata-rata relevansi pengajaran dapat dilihat pada hasil uji Independent sample T test.

Terdapat dua tahap analisis yang harus dilakukan untuk melihat hasil *output* uji *independent sample T test*. Pertama, kita harus menguji asumsi apakah *variance* populasi kedua sampel sama (*equal variance assumed*) ataukah berbeda (*equal variances not assumed*) dengan melihat nilai *levене's test*. Kedua, setelah mengetahui *variance* sama atau tidak, kita melihat nilai t-test untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata secara signifikan.

Berdasarkan hasil uji *levене's test*, nilai hitung *levене's test* (F) sebesar 0,001 dengan probabilitas (Sig.) sebesar 0,978. Nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 menunjukkan jika *variance* kedua sampel adalah sama.

Oleh karena itu, analisis uji beda t-test menggunakan *equal variance assumed*. Hipotesis 1 (satu) memiliki nilai Sig. perbedaan rata-rata relevansi pengajaran sebesar 0,000. Hasil ini lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,01$ (Sig. relevansi pengajaran = 0,000 < nilai $\alpha = 0,01$) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata relevansi pengajaran akuntansi forensik pada PTN berbeda secara signifikan dengan rata-rata relevansi pengajaran akuntansi forensik pada PTS.

Berdasarkan hasil uji rata-rata dan *Independent Sample T test* dapat diketahui bahwa rata-rata relevansi pengajaran akuntansi forensik pada PTN lebih besar dari rata-rata relevansi pengajaran akuntansi forensik pada PTS dan benar-benar berbeda secara signifikan. Hal ini menunjukkan hipotesis 1 (satu) yang menyatakan relevansi pengajaran akuntansi forensik pada PTN lebih tinggi daripada PTS terbukti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan akuntansi forensik pada PTN akan diberikan dengan cara sebagai berikut : mengintegrasikan pada matakuliah akuntansi dan audit (48,39%), memberikan pendidikan akuntansi forensik sebagai matakuliah tersendiri (45,16%), dan responden sebanyak 6,45% menyatakan tidak

memberikan pendidikan akuntansi forensik sedangkan pada PTS pendidikan akuntansi forensik akan diberikan dengan cara memberikan pendidikan akuntansi forensik sebagai matakuliah tersendiri (53,12%), mengintegrasikan pada matakuliah akuntansi dan audit (34,37%), dan 12,5% responden menyatakan tidak memberikan akuntansi forensik.

Hasil penelitian menunjukkan jika PTN berencana untuk memberikan akuntansi forensik dalam waktu 2 tahun (32,26%), dalam 1 tahun (25,81%), dalam 5 tahun (16,19%), tidak berencana memberikan (6,45%), dan 6,45% menyatakan tidak tahu kapan akan memberikan pendidikan akuntansi forensik sedangkan PTS berencana untuk memberikan akuntansi forensik dalam waktu 5 tahun (43,75%), dalam 2 tahun (31,25%), dalam 1 tahun (12,5%) dan 12,5% responden menyatakan tidak akan memberikan pendidikan akuntansi forensik. Berdasarkan hasil penelitian, PTN menyatakan bahwa akuntansi forensik sebaiknya diberikan pada tingkatan S1 (29,03%), S2 (32,26%), S1 dan S2 (38,71%), dan pada tingkatan lain seperti ppak (3,22%), sedangkan PTS menyatakan akuntansi forensik sebaiknya diberikan pada tingkatan S1 (25%), S2 (21,87%), S1 dan S2 (53,12%).

Responden pada PTN sebesar 77,41% menyatakan akan mendapat dukungan dalam memberikan akuntansi forensik, 12,90% responden menyatakan tidak mendapat dukungan, dan 9,67% responden menyatakan tidak tahu apakah akan memperoleh dukungan atau tidak dalam memberikan akuntansi forensik. Sebanyak 78,13% responden pada PTS menyatakan akan mendapat dukungan dalam memberikan akuntansi forensik dan 21,87% menyatakan tidak mendapat dukungan.

Perbedaan manfaat pengajaran antara PTN dan PTS

Berdasarkan hasil uji rata-rata manfaat pengajaran pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa rata-rata manfaat pengajaran pada

PTN lebih tinggi dari PTS. Hal ini dapat diketahui dari nilai *mean* untuk kelompok PTN adalah 31,1613, sedangkan *mean* untuk kelompok PTS adalah 29,2500 (*mean* PTN > *mean* PTS). Untuk mengetahui apakah perbedaan ini memang nyata secara statistik maka kita harus melihat hasil uji *independent sample T-test*.

Tabel 3 menunjukkan jika F hitung *levene's test* sebesar 1,882 dengan probabilitas (Sig.) sebesar 0,175. Nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 menunjukkan jika *variance* kedua sampel adalah sama. Oleh karena itu, analisis uji beda t-test menggunakan *equal variance assumed*. Hipotesis 2 (dua) memiliki nilai Sig. perbedaan rata-rata manfaat pengajaran sebesar 0,049. Hasil ini lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ (Sig. manfaat pengajaran = 0,049 < nilai $\alpha = 0,05$) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata manfaat pengajaran akuntansi forensik pada PTN berbeda secara signifikan dengan rata-rata manfaat pengajaran akuntansi forensik pada PTS.

Berdasarkan hasil uji rata-rata dan *Independent Sample T test* dapat diketahui bahwa rata-rata manfaat pengajaran akuntansi forensik pada PTN lebih besar dari rata-rata manfaat pengajaran akuntansi forensik pada PTS dan benar-benar berbeda secara signifikan. Hal ini menunjukkan hipotesis 2 (dua) yang menyatakan manfaat pengajaran akuntansi forensik pada PTN lebih tinggi daripada PTS terbukti.

Perbedaan hambatan pengajaran antara PTN dan PTS

Berdasarkan hasil uji rata-rata hambatan pengajaran pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa rata-rata hambatan pengajaran pada PTN lebih rendah dari PTS. Hal ini dapat diketahui dari nilai *mean* untuk kelompok PTN adalah 18,35, sedangkan *mean* untuk kelompok PTS adalah 18,88 (*mean* PTN < *mean* PTS). Untuk mengetahui taraf signifikansi perbedaan rata-rata hambatan pengajaran dapat dilihat pada hasil uji *Independent Sample T test*. Berdasarkan hasil uji *levene's test* pada tabel 3,

nilai hitung *levene's test* sebesar 2,909 dengan nilai probabilitas sebesar 0,093. Nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 menunjukkan jika *variance* kedua sampel adalah sama. Oleh karena itu, analisis uji beda t-test menggunakan *equal variance assumed*. Hipotesis 3 (tiga) memiliki nilai Sig. perbedaan rata-rata hambatan pengajaran sebesar 0,619. Hasil ini lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$ (Sig. hambatan pengajaran = 0,619 > nilai $\alpha = 0,05$) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata hambatan pengajaran akuntansi forensik pada PTN tidak berbeda dengan rata-rata hambatan pengajaran akuntansi forensik pada PTS.

Berdasarkan hasil uji rata-rata dan *Independent Sample T test* dapat diketahui bahwa rata-rata hambatan pengajaran akuntansi forensik pada PTN tidak berbeda signifikan dengan hambatan pengajaran akuntansi forensik pada PTS. Hal ini menunjukkan hipotesis 3 (tiga) yang menyatakan hambatan pengajaran akuntansi forensik pada PTN lebih rendah daripada PTS tidak terbukti.

Perbedaan materi ajar antara PTN dan PTS

Berdasarkan hasil uji rata-rata materi ajar pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa rata-rata materi ajar pada PTN lebih tinggi dari PTS. Hal ini dapat diketahui dari nilai *mean* untuk kelompok PTN adalah 202,19, sedangkan *mean* untuk kelompok PTS adalah 189,91 (*mean PTN > mean PTS*). Untuk mengetahui taraf signifikansi perbedaan rata-rata materi ajar dapat dilihat pada hasil uji *Independent Sample T Test*.

Berdasarkan hasil uji *levene's test* pada tabel 3, nilai hitung *levene's test* sebesar 2,388 dengan nilai probabilitas sebesar 0,127. Nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 menunjukkan jika *variance* kedua sampel adalah sama. Oleh karena itu, analisis uji beda t-test menggunakan *equal variance assumed*. Hipotesis 4 (empat) memiliki nilai Sig. perbedaan rata-rata hambatan pengajaran sebesar 0,068. Hasil ini lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,1$ (Sig. hambatan pengajaran = 0,068 > nilai $\alpha = 0,1$) maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa rata-rata materi ajar akuntansi forensik pada PTN berbeda dengan rata-rata materi ajar akuntansi forensik pada PTS.

Berdasarkan hasil uji rata-rata dan *Independent Sample T test* dapat diketahui bahwa rata-rata materi ajar akuntansi forensik pada PTN lebih besar dari rata-rata materi ajar akuntansi forensik pada PTS dan berbeda secara signifikan. Hal ini menunjukkan hipotesis 4 (empat) yang menyatakan materi ajar akuntansi forensik pada PTN lebih berbobot daripada PTS terbukti.

Perbedaan mekanisme pembelajaran antara PTN dan PTS

Berdasarkan hasil uji rata-rata mekanisme pembelajaran pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa rata-rata mekanisme pembelajaran pada PTN lebih tinggi dari PTS. Hal ini dapat diketahui dari nilai *mean* untuk kelompok PTN adalah 27,26, sedangkan *mean* untuk kelompok PTS adalah 24,31 (*mean PTN > mean PTS*). Untuk mengetahui taraf signifikansi perbedaan rata-rata materi ajar dapat dilihat pada hasil uji *Independent sample T test*.

Tabel 3 menunjukkan jika F hitung *levene's test* sebesar 1,118 dengan probabilitas sebesar 0,295. Nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 menunjukkan jika *variance* kedua sampel adalah sama. Oleh karena itu, analisis uji beda t-test menggunakan *equal variance assumed*. Hipotesis 5 (lima) memiliki nilai Sig. perbedaan rata-rata manfaat pengajaran sebesar 0,001. Hasil ini lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,01$ (Sig. manfaat pengajaran = 0,001 < nilai $\alpha = 0,01$) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata mekanisme pembelajaran akuntansi forensik pada PTN berbeda secara signifikan dengan rata-rata mekanisme pembelajaran akuntansi forensik pada PTS.

Berdasarkan hasil uji rata-rata dan *Independent Sample T test* dapat diketahui bahwa rata-rata mekanisme pembelajaran akuntansi forensik pada PTN lebih besar dari rata-rata manfaat pengajaran akuntansi

forensik pada PTS dan benar-benar berbeda secara signifikan. Hal ini menunjukkan hipotesis 5 (lima) yang menyatakan mekanisme pembelajaran akuntansi forensik pada PTN lebih tinggi daripada PTS terbukti.

Pembahasan Hasil Penelitian Perbedaan relevansi pengajaran antara PTN dan PTS

Hipotesis 1 (satu) menyatakan bahwa relevansi pengajaran akuntansi forensik pada PTN lebih tinggi dari PTS. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata relevansi pengajaran pada PTN lebih besar dan berbeda secara signifikan dari rata-rata relevansi pengajaran PTS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rezaee *et al.* (2004) dan Mayangsari dan Hidayatullah (2012) yang menyatakan terdapat perbedaan relevansi pengajaran akuntansi forensik antara akademisi dan praktisi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTN memiliki penilaian lebih tinggi dari pada PTS terkait permintaan dan ketertarikan pada akuntansi forensik akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus kecurangan keuangan yang terjadi saat ini baik di Indonesia maupun negara-negara lain. Akan tetapi peningkatan permintaan pada akuntansi forensik belum didukung oleh kurikulum akuntansi. Kurikulum akuntansi saat ini tidak cukup untuk merespons permintaan pada akuntansi forensik. Hal ini terlihat dari perguruan tinggi yang sebagian besar belum memberikan materi akuntansi forensik.

Adanya peningkatan permintaan dan ketertarikan pada akuntansi forensik akan memberikan kesempatan kerja di bidang akuntansi forensik. Teori *stakeholders* pada perguruan tinggi menjelaskan bahwa alumni memiliki kepentingan untuk menggunakan ilmu yang diperoleh dalam mendapatkan pekerjaan dan perguruan tinggi memiliki kepentingan untuk menghasilkan lulusan yang dapat diserap pasar tenaga kerja. Berdasarkan teori tersebut, PTN memiliki kepentingan yang lebih besar

daripada PTS untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan akuntansi forensik sehingga dapat memenuhi peluang kerja di bidang akuntansi forensik. Hal ini menunjukkan PTN memiliki relevansi pengajaran akuntansi forensik lebih besar daripada PTS.

Kurikulum akuntansi seharusnya memberikan materi akuntansi forensik sebagai modal bagi mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi forensik. Selain itu, perguruan tinggi sebaiknya mendorong dan menyarankan mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi forensik karena profesi di bidang ini masih jarang diketahui oleh mahasiswa akuntansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 32,26% responden di PTN menyatakan berencana untuk memberikan akuntansi forensik dalam waktu 2 tahun, sedangkan 43,75% responden pada PTS berencana untuk memberikan akuntansi forensik dalam waktu 5 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan jika PTN lebih siap untuk memberikan akuntansi forensik dalam waktu dekat. Hal ini dapat dipicu oleh kesiapan dosen PTN sebagai pengajar untuk memberikan akuntansi forensik. Selain itu, kesiapan mahasiswa PTN dapat menjadi pertimbangan dalam pengajaran akuntansi forensik. Mahasiswa PTN yang dianggap memiliki kemampuan intelektual yang lebih baik dibanding mahasiswa PTS diharapkan lebih siap untuk menerima materi akuntansi forensik. Hasil penelitian pada PTN dan PTS menunjukkan bahwa responden akan mendapat dukungan untuk menawarkan pendidikan akuntansi forensik dan pengajaran akuntansi forensik sebaiknya diberikan pada tingkatan S1 dan S2. Berdasarkan jawaban responden, 48,39% responden menyatakan jika pendidikan akuntansi forensik pada PTN akan diberikan dengan cara mengintegrasikan pada matakuliah akuntansi dan audit, sedangkan pada PTS pendidikan akuntansi forensik akan diberikan dengan cara memberikan pendidikan akuntansi forensik sebagai matakuliah tersendiri (53,12%).

Perbedaan manfaat pengajaran antara PTN dan PTS

Hipotesis 2 (dua) menyatakan bahwa manfaat pengajaran akuntansi forensik pada PTN lebih tinggi dari PTS. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata manfaat pengajaran pada PTN lebih besar dan berbeda secara signifikan dari rata-rata manfaat pengajaran PTS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rezaee *et al.* (2004) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan manfaat pengajaran akuntansi forensik menurut akademisi dan praktisi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTN mendapatkan manfaat yang lebih besar dibanding PTS dalam pengajaran akuntansi forensik. Manfaat pengajaran akuntansi forensik dapat dirasakan oleh mahasiswa diantaranya membuat mahasiswa lebih diinginkan oleh pasar tenaga kerja. Hal ini didukung oleh teori *stakeholders* pada perguruan tinggi yang mengatakan bahwa alumni memiliki kepentingan untuk menggunakan ilmu yang diperoleh untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan meningkatnya permintaan dan ketertarikan pada akuntansi forensik memberi peluang besar bagi mahasiswa yang memiliki pendidikan akuntansi forensik untuk berkarir di bidang akuntansi forensik sehingga dapat memenuhi permintaan tersebut.

Rezaee *et al.* (2004) menjelaskan ruang lingkup akuntansi forensik terdiri dari pemeriksaan kecurangan (*fraud examination*), bantuan pada hukum pengadilan (*litigation support*), dan saksi ahli (*expert witnessing*). Pengajaran akuntansi forensik diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk mempersiapkan diri terlibat dalam ruang lingkup tersebut. Tingginya tingkat kecurangan keuangan dan semakin beragamnya teknik dalam melakukan kecurangan yang terjadi terkadang membutuhkan bantuan bidang akuntansi forensik untuk menyelesaikan masalah kecurangan keuangan. Teori *stakeholders* pada perguruan tinggi menjelaskan bahwa masya-

rakat memiliki kepentingan dengan mengharapkan peran serta perguruan tinggi dalam menjaga kesehatan lingkungan masyarakat. Mahasiswa yang mendapatkan materi tentang akuntansi forensik diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh untuk melakukan praktek di bidang akuntansi forensik sehingga dapat turut serta dalam menyelesaikan berbagai kasus *fraud* dan membantu menciptakan lingkungan yang sehat sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan jika mahasiswa PTN dapat menerima manfaat pengajaran yang lebih baik dibanding mahasiswa PTS. Hal ini dapat disebabkan oleh kemampuan mahasiswa PTN dalam menyerap materi sehingga mahasiswa PTN lebih mudah dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari pengajaran akuntansi forensik.

Rezaee *et al.* (2004) mengatakan banyaknya *fraud* yang terjadi pada laporan keuangan telah mengurangi kepercayaan investor. Hal ini membuat kurangnya kredibilitas laporan keuangan. Peran akuntansi forensik untuk mengungkap dan memberantas *fraud* dapat membantu meningkatkan keyakinan investor dan kredibilitas pada laporan keuangan. Peran akuntansi forensik tersebut juga dapat mendorong tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan *corporate governance*.

Perbedaan hambatan pengajaran antara PTN dan PTS

Hipotesis 3 (tiga) menyatakan bahwa hambatan pengajaran akuntansi forensik di PTN lebih rendah dari PTS. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan hambatan pengajaran pada PTN dengan pengajaran pada PTS. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam mengintegrasikan akuntansi forensik dalam kurikulum akuntansi baik pada PTN maupun PTS dan hambatan keduanya tidak berbeda. Hambatan dalam pengajaran akuntansi forensik dapat berasal dari fakultas seperti kurangnya ketertarikan dan dukungan fakultas pada akuntansi forensik.

Hal ini dapat disebabkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengajaran akuntansi forensik dan fakultas belum melihat adanya peluang peningkatan penggunaan jasa di bidang akuntansi forensik yang dapat menjadi kesempatan kerja bagi lulusan mahasiswa akuntansi. Kurangnya dukungan pada pengejaran akuntansi forensik juga dapat disebabkan oleh minimnya sumber dana keuangan.

Hambatan lain dalam pengajaran akuntansi forensik adalah kurangnya materi pembelajaran seperti *textbook* dan kurangnya minat mahasiswa. Materi pembelajaran seperti *textbook* dibutuhkan dalam kegiatan perkuliahan sebagai sumber bacaan bagi mahasiswa dan mempermudah dalam penyampaian materi. Minimnya *textbook* mengenai akuntansi forensik dapat menyulitkan mahasiswa dalam belajar dan memahami materi akuntansi forensik. Kurangnya minat mahasiswa juga menjadi penghambat dalam pengajaran akuntansi forensik. Mahasiswa sebagai pihak yang mengikuti kegiatan perkuliahan seharusnya memiliki ketertarikan pada materi yang diajarkan. Mahasiswa yang kurang memiliki minat pada materi tertentu terkadang lebih sulit dalam memahami materi yang diajarkan. Hal ini tentu menghambat proses pembelajaran dan dapat berdampak tidak tercapainya tujuan dari pembelajaran. Selain faktor-faktor di atas, responden menyebutkan faktor lain yang dapat menghambat pengajaran akuntansi forensik seperti kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai akuntansi forensik dan kurangnya sumber daya manusia sebagai pengajar akuntansi forensik.

Tiga hambatan pengajaran terbesar yang terdapat pada PTN dan PTS diantaranya kurangnya materi pembelajaran seperti *textbook*, kurangnya minat mahasiswa, kurangnya ketertarikan fakultas pada akuntansi forensik. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rezaee *et al.* (2004) yang menyatakan bahwa hambatan terbesar dalam memberikan pendidikan akuntansi forensik adalah sumber dana

keuangan. Teori *stakeholders* mengatakan bahwa pengelola perguruan tinggi memiliki kepentingan untuk mengelola perguruan tinggi secara efektif dan efisien serta mampu menghasilkan lulusan yang dapat diserap tenaga kerja. Hambatan mengintegrasikan akuntansi forensik yang lebih rendah di PTN daripada PTS menunjukkan jika PTN dapat mengelola perguruan tinggi lebih efektif dan efisien sehingga mampu mengurangi hambatan dalam mengintegrasikan akuntansi forensik.

Perbedaan materi ajar antara PTN dan PTS

Hipotesis 4 (empat) menyatakan bahwa materi ajar akuntansi forensik pada PTN lebih berbobot dari PTS. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata materi ajar pada PTN lebih besar dan berbeda dengan rata-rata materi ajar pada PTS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rezaee *et al.* (2004) dan Mayangsari dan Hidayatullah (2012) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan materi ajar akuntansi forensik menurut akademisi dan praktisi.

Adanya perbedaan antara materi ajar antara PTN dan PTS dapat disebabkan oleh perbedaan *input* mahasiswa antara PTN dan PTS. Mahasiswa PTN dinilai memiliki kemampuan intelektual yang lebih baik karena untuk menjadi mahasiswa PTN harus melalui proses seleksi yang ketat. Materi ajar yang diberikan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Mahasiswa dengan kemampuan intelektual di atas rata-rata dapat diberikan materi yang lebih berbobot seperti materi yang bersifat praktek atau teknik dalam akuntansi forensik sehingga materi yang diajarkan tidak hanya bersifat teoritis. Teori *stakeholders* pada perguruan tinggi menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki kepentingan untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan memperoleh pelayanan yang memuaskan. Adanya perbedaan mahasiswa antar perguruan tinggi seharusnya disikapi dengan memberikan materi ajar yang sesuai dengan kondisi mahasiswa sehingga maha-

siswa dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhannya. Akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin ilmu akuntansi, audit, dan hukum (Tuanakotta, 2010). Berdasarkan definisi tersebut, materi ajar yang diberikan sebaiknya meliputi bidang ilmu akuntansi, audit, dan hukum. Materi ajar yang penting untuk diberikan menurut dosen PTN dan PTS di bidang akuntansi seperti standar dan prinsip pelaporan keuangan, proses keuangan dan analisis, permasalahan dalam akuntansi. Materi akuntansi dapat memberi pengetahuan tentang proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal ini dibutuhkan oleh akuntan forensik karena banyak kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan. Materi audit yang diberikan terkait dengan *fraud* yang terdiri dari *fundamental of fraud*, teori dan metodologi dari pemeriksaan kecurangan, jenis-jenis *fraud*, kecurangan pada laporan keuangan, *cyber and computer fraud*, kriminologi dan *white collar crime* dan materi tentang *anti-fraud*. Materi ajar yang terkait dengan *fraud* penting untuk diberikan kepada mahasiswa. Hal ini terkait dengan pemanfaatan akuntansi forensik untuk pemeriksaan *fraud*. Pemahaman yang mendalam pada materi terkait *fraud* dapat membantu mahasiswa saat terjun di dunia kerja bidang akuntansi forensik sehingga mempermudah dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan penyelesaian masalah *fraud* dan diharapkan dapat membantu dalam memberantas *fraud* yang semakin banyak terjadi. Selain materi *fraud*, materi audit tentang pengendalian internal penting diberikan untuk menilai seberapa baiknya pengendalian perusahaan untuk mencegah kecurangan.

Materi akuntansi forensik yang terkait dengan hukum di antaranya pengetahuan tentang sistem hukum, unsur hukum tentang kecurangan, dan hukum pembuktian (*rules of evidence*). Materi mengenai hukum dibutuhkan dalam penerapan akuntansi forensik karena penyelesaian *fraud* dapat diselesaikan di luar ataupun di dalam pengadilan. Hal ini terkait dengan ruang

lingkup akuntansi forensik yang dapat terlibat dalam bantuan hukum pengadilan dan saksi ahli.

Akuntansi forensik merupakan bidang ilmu yang jarang terdengar oleh mahasiswa akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan materi yang terkait dengan karir di bidang akuntansi forensik, organisasi profesi dan standar profesional yang berkaitan dengan akuntansi forensik sebagai wawasan baru dan diharapkan dapat menumbuhkan minat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi forensik. Selain materi yang bersifat teoritis, materi ajar akuntansi forensik sebaiknya memberikan materi yang bersifat praktek untuk mempermudah penerapan akuntansi forensik untuk mengatasi *fraud*. Materi yang dapat diberikan seperti teknik investigasi, teknik penyembunyian aset, teknik pengendalian internal, teknik konsultasi litigasi, dan teknik saksi ahli.

Perbedaan mekanisme pembelajaran antara PTN dan PTS

Hipotesis 5 (lima) menyatakan bahwa mekanisme pembelajaran akuntansi forensik pada PTN lebih tinggi dari PTS. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata mekanisme pembelajaran pada PTN lebih besar dan berbeda secara signifikan dengan rata-rata mekanisme pembelajaran pada PTS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembelajaran dengan kasus, *research project*, *textbook*, dosen tamu, video, dan *field trip* lebih penting untuk diterapkan pada PTN daripada PTS. Adanya perbedaan kondisi seperti kemampuan intelektual mahasiswa dapat menyebabkan perbedaan mekanisme yang digunakan. Teori *stakeholders* pada perguruan tinggi menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki kepentingan untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Hal ini sebaiknya disikapi dosen untuk merancang mekanisme pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar. Mekanisme pembelajaran kasus dan *research project* merupakan mekanisme pembelajaran dengan nilai rata-rata ter-

tinggi pertama dan kedua. Kasus dan *research project* dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktek akuntansi forensik sehingga dapat membantu mahasiswa untuk memahami materi lebih mendalam dan lebih siap untuk terlibat pada praktek akuntansi forensik dalam mengatasi *fraud*. Mekanisme pembelajaran dengan nilai rata-rata tertinggi ketiga hingga keenam adalah *textbook*, dosen tamu, video, dan *fields trip*. *Textbook* berfungsi sebagai salah satu sumber materi dan pedoman dalam pembelajaran dalam akuntansi forensik. Dosen tamu, video dan *fields trip* dapat digunakan sebagai wawasan tambahan sehingga pembelajaran tidak hanya bersumber dari *textbook*. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rezaee *et al.* (2004) yang menyatakan mekanisme pembelajaran akuntansi forensik yang penting dilakukan di antaranya kasus, *textbooks*, *research project*, dosen tamu, video dan *field trips*.

Berdasarkan pembahasan di atas dan teori *stakeholders* dalam perguruan tinggi, terdapat beberapa pihak yang berkepentingan dalam pengajaran akuntansi forensik. Pertama, adalah mahasiswa dan alumni yang membutuhkan pengajaran yang dapat menjadi bekal memasuki dunia kerja, dalam hal ini terkait dengan peluang untuk berkarir di bidang akuntansi forensik. Kedua, perguruan tinggi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa seperti memberi pengajaran yang mempunyai relevansi dengan kondisi saat ini. Ketiga, pemerintah yang mempunyai kepentingan dalam usaha pemberantasan *fraud*. Pengajaran akuntansi forensik diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi mahasiswa sehingga dapat turut serta dalam usaha memberantas *fraud* dan menciptakan negara yang bebas korupsi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan sebelum-

nya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa relevansi pengajaran akuntansi forensik pada PTN lebih tinggi dari PTS. Hal ini ditunjukkan oleh hasil rata-rata relevansi pengajaran pada PTN yang lebih besar dan berbeda secara signifikan dari rata-rata relevansi pengajaran PTS. Hasil penelitian mengindikasikan ketertarikan yang lebih besar pada PTN untuk memberi pengajaran akuntansi forensik. Ketertarikan tersebut disebabkan oleh kemungkinan peningkatan permintaan penggunaan jasa akuntansi forensik sehingga menciptakan kesempatan kerja di bidang akuntansi forensik. 2) Hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa manfaat pengajaran akuntansi forensik pada PTN lebih tinggi dari PTS. Hal ini ditunjukkan oleh hasil rata-rata manfaat pengajaran PTN lebih besar dan berbeda secara signifikan dari hasil rata-rata manfaat pengajaran PTS. Hasil penelitian mengindikasikan mahasiswa PTN sebagai pihak yang menerima pembelajaran akuntansi forensik dapat menerima manfaat yang lebih besar dibanding mahasiswa PTS. Hal ini dapat disebabkan oleh kemampuan mahasiswa PTN dalam menyerap materi sehingga mahasiswa PTN lebih mudah dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan mendapatkan manfaat dari proses pembelajaran. Manfaat yang dapat diperoleh di antaranya membuat mahasiswa lebih diinginkan oleh pasar tenaga kerja dan membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk berkarir di bidang akuntansi forensik dalam hal pemeriksaan kecurangan, memberi bantuan hukum, dan bertindak sebagai saksi ahli. 3) Hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa hambatan pengajaran akuntansi forensik di PTN tidak berbeda dengan PTS. Hasil penelitian mengindikasikan terdapat hambatan dalam mengintegrasikan akuntansi forensik dalam kurikulum akuntansi antara PTN dan PTS tidak berbeda. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya kurangnya materi pembelajaran seperti *textbook*, kurangnya minat mahasiswa, dan kurang-

nya ketertarikan fakultas pada akuntansi forensik. 4) Hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa materi ajar akuntansi forensik pada PTN lebih berbobot dari PTS. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata materi ajar pada PTN lebih besar dan berbeda dengan rata-rata materi ajar pada PTS. Hasil penelitian mengindikasikan perbedaan kemampuan intelektual mahasiswa menyebabkan perbedaan materi ajar akuntansi forensik. Mahasiswa PTN yang memiliki kemampuan intelektual lebih tinggi dari mahasiswa PTS dapat diberikan materi yang lebih berbobot seperti materi yang bersifat praktek atau teknik yang dibutuhkan dalam akuntansi forensik sehingga materi yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis. 5) Hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa mekanisme pembelajaran akuntansi forensik pada PTN lebih tinggi dari PTS. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata mekanisme pembelajaran PTN lebih besar dan berbeda secara signifikan dengan rata-rata mekanisme pembelajaran PTS. Hasil penelitian mengindikasikan perbedaan kemampuan intelektual antara mahasiswa PTN dan PTS mengakibatkan perbedaan mekanisme pembelajaran yang digunakan oleh dosen dalam menyampaikan materi akuntansi forensik. Mekanisme pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran akuntansi forensik di antaranya kasus, *research project*, *textbook*, dosen tamu, video dan *fields trip*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberi saran yang perlu dipertimbangkan untuk penelitian berikutnya adalah: 1) Penelitian selanjutnya dalam menyebarkan kuesioner sebaiknya tidak dilakukan di bulan-bulan audit sehingga kuesioner yang dikirimkan diharapkan dapat memiliki tingkat pengembalian yang tinggi. 2) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah responden yang tidak hanya dibatasi oleh responden dosen sehingga hasil penelitian lebih menggeneralisir dan dapat memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai

pendidikan dan praktek akuntansi forensik. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan responden praktisi seperti akuntan publik, internal auditor, auditor BPK dan BPKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshurafat, H., C. Beattie, G. Jones, dan J. Sands. 2019. Forensic Accounting Core and Interdisciplinary Curricula Components in Australian Universities: Analysis of Websites. *Journal of Forensic and Investigative Accounting* 11(2): Special Edition.
- Bhavani, G., C. T. Amponsah, dan A. Mehta. 2018, Forensic Accounting Education in UAE: An exploratory study with diverse Stakeholders, *Accountancy Business and the Public Interest* 17.
- Carpenter, T. D., C. Durtschi, dan L. M. Gaynor. 2011. The incremental benefits of a forensic accounting course on skepticism and fraud-related judgments. *Issues in Accounting Education* 26 (1): 1-21.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2002. *Belajar dan Pembelajaran*. PT Asdi Mahasatya. Jakarta.
- Efiong, E. J. 2012. Forensic accounting education: An exploration of level of awareness in developing economies-Nigeria as a case study. *International Journal of business and management* 7 (4): 26.
- Freeman, R. E., dan D. L. Reed. 1983. Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance. *California management review* 25(3): 88-106.
- Ghozali, I. dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hidayat, S. E., dan A. H. Al-Hadrami. 2015. Forensic Accounting Education In Bahrain: A Survey on Educators' Opinion. *Int. J. Ped. Inn*, 3(1).
- Huber, W. 2012. Is forensic accounting in the United States becoming a profession? *Journal of Forensic & Investigative Accounting* 4(1).

- Kramer, B., M. Seda, dan G. Bobashev. 2016. Current Opinions on Forensic Accounting Education. *Accounting Research Journal* 30(3): 249-264.
- Mayangsari, S. 2012. *Forensic Accounting Education: Academicians and Practitioners'view*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin
- Novia, W. 2006. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Kashiko. Surabaya.
- Rezaee, Z., D. L. Crumbley, dan R.C. Elmore. 2004. Forensic Accounting Education: A Survey of Academicians and Practitioners. *Advances in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations* 6: 193-231.
- Sayyid, A. 2013. Fraud dan Akuntansi Forensik (Upaya Minimalisasi Kecurangan dan Rekayasa Keuangan). *Jurnal At-Taradhi* 4(1).
- Sekaran, U., dan R. Bougie. 2016, *Research Methods for Business A Skill-Building Approach*. John Wiley & Sons Ltd.
- Sugianto dan Jiantari. 2014. Akuntansi Forensik: Perlukah Ada dalam Kurikulum Jurusan Akuntansi? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5(3): 355-364.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suhernita, E. Yonnedi, dan V. Juita. 2012. *Pengajaran Akuntansi Forensik di Indonesia: Persepsi Akademisi dan Auditor di Sumatera Barat*. Konferensi Nasional Pendidikan Akuntansi Indonesia. Malang.
- Syah, M. 2002. *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*. Rosdakarya. Bandung.
- Tuanakotta, T. M. 2010. *Akuntansi Foresik dan Audit Investigatif*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wijatno, S. 2009. *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis Untuk Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Zamira, A. K., dan D. Darsono. 2014. Persepsi Akademisi dan Praktisi Akuntansi terhadap Akuntansi Forensik sebagai Profesi Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting* 3 3): 1-13.